

PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

(Suatu study di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud)¹

Oleh : Jein Riwune Laira²

ABSTRAK

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Penelitian ini berbentuk kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, aparat juga kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, selain itu pihak kecamatan juga tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat lebih jarang memberikan pencerahan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan aparat tidak terarah dengan baik.

Kata Kunci : Peran Camat, Kinerja Aparatur

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi administrative yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan penuh dinamika, maka kecamatan menghadapi banyak masalah dimana masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis.

Mencermati eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kabupaten dan kota, maka camat selaku kepala pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan, disinilah tugas dan kewenangan camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, maupun, pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya.

Bisa di pahami Camat mengemban serangkaian tugas dan wewenang yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi 7 indikator”. Dalam Pasalnya 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Tugas

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. Seterusnya Pasal 27 mengatakan Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi camat untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai.

Desa Gemeh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gemeh, yang mempunyai kesamaan fungsi dengan desa-desa yang lainnya yakni salah satunya pelayanan kepada masyarakat. Dari pengamatan awal pengamatan penulis di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh, Kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, penulis juga melihat aparat pemerintah desa gemeh kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan.

Selain dari hal-hal diatas penulis juga melihat pihak kecamatan tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang dilegitimasi menjalankan undang-undang seharusnya membina aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. supervise atau pengarahan serta pengendalian dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah desa tidak maksimal, camat jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat walaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat tidak terarah dengan baik. Maka dari inilah maka diharapkan camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat desa apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan menekankan pada : Peran Camat dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984:237).

Menurut Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut Polak, peranan adalah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal. Dengan demikian peranan adalah pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek (Ndraha, 1993:114).

Menurut Chinoy yang dikutip oleh Soekanto, peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat (Soekanto, 1992:269)

Menurut Siagian (1993:30) Selain dari hal tersebut diatas, dalam bagian yang lain dikemukakan bahwa peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
3. Peranan adalah suatu konsep psikal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat ,Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

Konsep Camat

Menurut Bayu Suryaningrat (1981;2) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota.camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi bahwa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang camat meliputi 5 bidang kewenangan pemerintah yaitu:

- 1.) Bidang pemerintah
- 2.) Bidang pembangunan dan ekonomi
- 3.) Bidang pendidikan dan kesehatan
- 4.) Bidang sosial dan kesejahteraan
- 5.) Bidang pertahanan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat 1 tentang kecamatan disebutkan bahwa camat menyelenggarakan Tugas Umum pemerintah yang meliputi :

- 1). Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2). Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum
- 3). Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang
- 4). Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5). Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- 6). Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
- 7). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya Dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau keseluruhan.

Selanjutnya pada pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 di tambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai Tugas dan wewenang camat baik untuk wewenang yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Konsep Kinerja

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan performance. Dalam kamus bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai berikut :

1. Sesuatu yang di capai
2. Prestasi yang diperlihatkan
3. Kemampuan kerja

Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja, Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat di capai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Gomes (2003:143) mengatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Whitmore menjelaskan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang dan juga suatu perbuatan, suatu prestasi suatu keterampilan. Dari semua definisi kinerja seperti di atas maka pada prinsipnya kinerja berkaitan dengan penampilan seseorang dalam suatu pekerjaan berdasarkan ukuran yang berlaku dari pekerjaan bidang tersebut. Penampilan kerja yang optimal dari karyawan akan menghasilkan produk yang meningkat secara efektif dan efisien .

Hal ini merupakan hal yang serius dari pimpinan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya maju tidaknya suatu organisasi tergantung dari perilaku individu dalam organisasi itu. Perilaku yang diharapkan pimpinan itu adalah perilaku yang meningkatkan kinerja karyawan. Perilaku mencerminkan sikap, keyakinan dan nilai seseorang/individu. Perilaku yang diharapkan oleh pemimpin organisasi adalah perilaku yang mencerminkan sikap, keyakinan dan nilai setiap karyawan yang akan pekerjaannya yang positif, yaitu yang menimbulkan motivasi kerja atau etos kerja.

Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini Jones (2002:92) mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan terjadinya kinerja yang buruk antar lain:

1. Kemampuan pribadi
2. Kemampuan manajer
3. Kesenjangan proses
4. Masalah lingkungan
5. Situasi pribadi
6. Motivasi.

Sementara itu Buchari Zainun (1989:51) mengemukakan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yaitu:

1. Ciri seseorang

2. Lingkungan luar
3. Sikap terhadap profesi pegawai.

Hunt dan Osborn (1982:76) lebih jauh mengungkapkan bahwa pengelolaan kinerja akan berdampak terhadap manajemen organisasi secara umum. Dari uraian diatas jelaslah bahwa kinerja pegawai di kelola terutama untk mencapai produktivitas dan efektivitas dalam rangka merancang bangun kesuksesan baik secara individu maupun organisasi.

Konsep Aparatur

Secara Etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri. Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur sebagaimana adalah:

1. Aparatur Negara

Aparatur negara adalah keseluruhan pejabat dan lembaga negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan Bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang ada di bawah Presiden seperti Departemen, Lembaga, Pemerintahan dan Departemen serta Sekretariat Departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara.

3. Aparatur Perekonomian Negara

Aparatur perekonomian negara adalah keseluruhan Bank Pemerintah, lembaga perkreditan, lembaga keuangan, pasar uang dan modal serta perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah.

Melihat luasnya pengertian dan adanya macam-macam istilah terhadap aparatur ini maka dalam tulisan ini dipakai istilah aparatur pemerintah. Dalam tulisan ini maka aparatur pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Abdi masyarakat itu ialah untuk melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan sebagai abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aparatur pemerintah adalah :

- a. Bersih
- b. Berwibawa
- c. Bermental baik
- d. Mempunyai kemampuan profesional yang tinggi

Konsep Pemerintah

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan luas, Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan Negara, yang kalau mengikuti pembidangan menurut Montesquieu, Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan Negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja.

Inu Kencana Syafiie (1994 : 11), memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Mac Iver dalam Inu Kencana Syafiie (200:6) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Secara Etimologis, kata Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara.
2. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara atau perbuatan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Mac Iver dalam Inu Kencana Syafiie (200:6) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Menurut W. S. Syare dalam Inu Kencana Syafiie (2005:5) mengemukakan maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi dari Negara yang memperlihatkan menjalankan kekuasaannya.

Kesimpulannya adalah Pemerintah di artikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan negara).

Konsep Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2006:34) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

HASIL PENELITIAN

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah bagaimana menciptakan

kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

Dalam bidang pemerintahan, aparat pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Camat sebagai pemimpin di kecamatan diamanatkan untuk melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan pekerjaan, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah guna kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan manajemen aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik, maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah:

1. Bimbingan

Dengan adanya pembimbingan dari pihak kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari perangkat desa Gemeh serta sikap yang disiplin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pembimbingan dapat dilakukan beberapa cara :

- Memberi pelatihan
- Memberi pengarahan
- Memberi petunjuk

2. Supervisi

Untuk terciptanya efektivitas pembinaan terhadap pemerintah desa, diperlukan adanya suatu tindakan nyata pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang akan mengawasi jalannya pelayanan yang adak diberikan oleh pemerintah kepada aparaturnya.

Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum yaitu pengaawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasa langsung kepada bawahannya. Dalam menilai supervise terhadap kinerja pemerintah desa, dapat dilihat dari indicator :

- Pengawasan langsung melalui kunjungan ke desa
- Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan

3. Konsultasi

Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapai tujuannya secara efisien itu tergantung berbagai factor. Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi jelaslah membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Disamping

itu, salah satu factor yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah konsultasi, untuk menilai proses konsultasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam membina pemerintah desa dapat digunakan beberapa indikator:

- Memberi masukan
- Menerima keluhan
- Memberi penjelasan

4. Fasilitas

Salah satu factor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Fasilitas yang dilakukan oleh camat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu

- Pemberian fasilitas pendukung
- Pemberian tenaga pembimbing

Untuk mengetahui hasil bimbingan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan Gemeh terhadap Pemerintah Desa Gemeh penulis mewawancarai para informan yang menurut penulis berkompeten menjawab pertanyaan yang diajukan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan, berikut ini tanggapan dari beberapa informan seperti : seorang staf di Desa Gemeh mengatakan : *Dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama dalam melayani masyarakat, kami di desa sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti computer, printer, kertas, tinta, buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebuah kantor, sejauh ini pihak kecamatan memberikan kebutuhan yang kami butuhkan biasanya yang dibutuhkan di desa adalah buku-buku isian, serta fasilitas dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.*

Hal senada dikatakan oleh Bapak Nove Perangkat Desa Gemeh beliau mengatakan : *pemberian fasilitas di kantor desa dalam mendukung tugas dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masih kurang, pemerintah kecamatan kurang peka dalam hal ini.*

Kepala Desa Gemeh juga menuturkan : *Pemberian tenaga pembimbing di kantor desa tidak pernah dilakukan oleh pihak kecamatan, seperti tenaga yang dapat melatih perangkat kami untuk mengoperasikan alat teknologi seperti computer tidak pernah didatangkan, kami harus belajar sendiri untuk dapat menguasainya, padahal kami sangat memerlukan hal tersebut agar dapat menunjang kinerja kami dalam melayani masyarakat*

Hal senada dikatakan oleh Bapak Piet seorang perangkat desa Gemeh Kecamatan Gemeh beliau mengatakan : *kami sebagai perangkat desa jujur saja masih memerlukan bimbingan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas kami, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, kami harus lebih lagi meningkatkan kemampuan kami dalam mengerjakan pekerjaan kami, apalagi teknologi sekarang ini semakin berkembang, maka kami harus mampu mengimbangnya.*

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah desa gemeh, dapat disimpulkan tidak maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya ‘menunggubol’ tidak berinisiatif dalam memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah desa.
2. Pelaksanaan supervise tidak jauh beda dengan pemberian bimbingan, pemerintah tidak melakukan supervise dengan mendatangi kantor desa dan melakukan pengawasan

- melekat dengan baik.
3. Sebagai pemerintah di atas pemerintah desa, pemerintah kecamatan khususnya camat mempunyai tugas untuk menjadi konsultan apabila terjadi suatu masalah, dalam hal ini pemerintah kecamatan gemah melaksanakannya dengan cukup baik. Namun konsultasi hanya dilakukan di kantor kecamatan saja.
 4. Pemberian fasilitas bagi pemerintah desa, baik pemberian fisik maupun non fisik belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari lembaga pemerintah desa itu sendiri.\

Saran

1. Disarankan kepada camat agar lebih peka terhadap situasi yang terjadi dilapangan, dimana harus lebih aktif dan kreatif dalam meningkatkan kinerja serta produktivitas kelembagaan khususnya desa terutama dalam memberikan bimbingan kepada perangkat desa.
2. Pemerintah kecamatan harus lebih sering berkunjung ke desa untuk mengetahui masalah riil dilapangan, dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap pemerintah desa, agar supaya apabila datang pemeriksaan dari pihak kabupaten, semuanya siap.
3. Perlu ditingkatkan intensitas dalam memberikan konsultasi kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan harus terjun langsung mencari tahu dilapangan, bukan hanya menunggu pengeluhan yang timbul dari masyarakat.
4. Pemberian fasilitas kepada pemerintah desa juga harus diperhatikan, karena fasilitas pendukung baik tenaga pembimbing maupun berupa barang dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Darma (1998), *perencanaan pelatihan, jakarta pusdiklat pegawai*
- Amstrong, Michael 1994, *Performance management* (andam kogun page ltd)
- Arimbi, Achmad Santosa , 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- A'sad 1995, *Perencanaan dan biaya pembangunan* , Penerbit UI Jakarta.
- Abdul.A.D. 1985, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berencana* Desertasi, Universitas Padjajaran Bandung.
- Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta Rineka Cipta, 1987. Dale.
- Furtmengler, 2007, *Penilaian Kinerja*, Penerbit Andi Ofset Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, 2005, *Penilaian Kerja Organisasi Publik*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Fagg D.D. 1958, *Authority and Social Structure: a Study in Javanese bureaucracy*, Camberige, Masschusetts, Harvard University (Microfilm).
- Gibson. J.L. J.M. Ivan Cevich dan Donnely, 1987, *Struktur Organisasi dan Manajemen : Prilaku Struktur dan proses* terjemahan, Sugondo Edisi 4 Erlangga Jakarta.
- Guilbert, 1977, *The Personal Function In Administration*, MC. Graw Hill Book
- Gardom Thoms 1994, *menjadi pemimpin yang efektif. Dasar untuk manajemen partisipidan keterlibatan kariawan*, Jakarta
- Hanif Nurcholis , *Dalam pertumbuhan dan penyelenggaraan Desa*
- Moleong.*Metode Penelitian*
- Nico Schlte Nordholt 1987, *Ojo Dumech- Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan* Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Noto Atmodjo, 2002, *Penilaian Kinerja Camat*, Penerbit CV Usaha Nasional Jakarta.
- Salim. A. 1989, *Analisis Manajemen Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Situmorang dan Jusuf Juhir, 2008, *Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintah*, Roasdakarya Bandung.

Syafiie, Inu Kencana, 1994. *Etika Pemerintah*. UPP AMPP TKPN < Yogyakarta.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* Co. New York.

Taylor. F.W. 1987, *Ilmu Manajemen*, Penerbit Bina Aksara Jakarta.

Unifah Rosidi 2007, *Reformasi Administrasi Sub Nasional suatu analisis reformasi administrasi Kecamatan di Kota Bogor*, Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia.

Wasistiono Sadu , Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta.

Wibowo. A. 2006, *Manajemen Kinerja*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Whitemore, 2007, *Penilaian kerja dan standar kinerja* Gramedia Asrigramedia

Sumber lainnya :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan